

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN
PERDAMAIAN DIBAWAH TANGAN DENGAN ADANYA PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP**



**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN DIBAWAH TANGAN DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Abstrak

Dalam masyarakat bila terjadi sengketa umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan yang sering dipergunakan, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa secara litigasi melalui proses gugatan di pengadilan dan non-litigasi. Berkaitan dengan perkara perdata, suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian kesepakatan perdamaian dibawah tangan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bagaimana akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum perjanjian kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini tidak memenuhi dua syarat untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum. Suatu perjanjian yang tidak sah atau perjanjian yang cacat hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Kata Kunci : Kesepakatan Perdamaian, Putusan Pengadilan,